



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

OPD Wajib Tindak Lanjuti Temuan BPK

BENGKULU - Badan Permeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Bengkulu mulai melaksanakan audit terinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Bengkulu tahun anggaran 2022. Di harapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov, untuk menindaklanjuti jika terdapat temuan.

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menyampaikan, BPK saat ini sedang melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tahun 2022. Sehingga diharapkan jika ada temuan keuangan di masing-masing OPD, agar segera ditindaklanjuti atau dikembalikan. "Yang paling penting jika ada temuan keuangan, agar OPD segera menindaklanjuti. Dan jika ada temuan kerugian, juga segera dikembalikan," ujar Rohidin.

Lanjut Rohidin, sebelum BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tentu ada waktu dan kesempatan kepada OPD untuk mengembalikan temuan. Termasuk jika ada kekurangan bersifat administrasi, juga segera diperbaiki. "Jika ada kekurangan-kekurangan dasar hukum dan yang bersifat administrasi agar segera dibuatkan dan perbaiki," terangnya.

Gubernur optimis LKPD tahun anggaran tahun 2022 Pemprov Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ini jika dilihat dari realisasi anggaran dan penggunaan anggaran yang tepat dan sesuai dengan aturan.

"Mudah-mudah kembali WTP karena jika melihat dari sisi kinerja dan pengalaman tahun sebelumnya, bisa meraih WTP kembali, Insya Allah,"

yakin Rohidin.

Tim auditor BPK akan melakukan audit selama 60 hari untuk melaksanakan audit lapangan dan sampai penyusunan hasil pemeriksaan sampai hasil menyerahkan laporan pemeriksaan ke pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian angka-angka dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan akan dilakukan secara sampel karena tidak semua populasi yang diperiksa, hanya ada beberapa populasi yang diperiksa atau aktivitas.

Kemudian pemeriksaan dilakukan untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan keuangan negara atau pelaksanaan keuangan negara. Tahun lalu dari 10 kabupaten/kota dan 1 Pemrov Bengkulu hanya satu daerah yakni Kabupaten Seluma tidak masuk opini WTP, yakni mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).**(juu)**